

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, 2001, Jakarta
- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: penafsiran hukum pidana dasar peniadaan, pemberatan & peringanan pidana kejahatan aduan perbarengan & ajaran kausalitas*.
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi yurisdiksi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*, 2010
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006
- Masruchin Ruba'iddin, *Buku Ajar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. ke XI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Bardi Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakakan Pidana*, Jakarta, PT. Grafika Nusantara, 2008

Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. Jakarta, PT. Grafika Nusantara.

Muhammad, R. (2007). Hukum acara pidana kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Poerwadarminta, W. J. S. (1966). Kamus umum bahasa Indonesia.

Perbawa, K. S. L. P. (2016). The Construction of Election Organizer Institution in Indonesia. *International Journal of Research in Social Sciences*, 6(4), 52-82.

Rahayu, Y. P. (2005). Dibalik putusan hakim: kajian psikologi hukum dalam perkara pidana. Srikandi.

Satjipto Raharjo, Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013

Sudarto, K. S. H. P., & Pidana, H. (1993). Bandung: Alumni, 1986.
Wignjosebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini."

Wahyuni, Fitri, (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama

Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL

Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17.1 (2017): 76-101.

Juliani, C., Effendi, E., & Putri, A. T. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERKARA NOMOR 742/Pid. B/2016/PN Pbr DENGAN PUTUSAN NOMOR 323/Pid. B/2016/PT Pbr. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 6(2), 1-15.

Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2), 93-100.

ROMULUS, S. A. Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209687.

D. SKRIPSI

FATHURRAHMAN, F. (2020). DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Kurniawan, D. (2021). Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

E. WEBSITE

<https://kbbi.web.id/disparitas,%20diakses%20pada%20tanggal%2019%20Oktober%202022%20pukul%2023.00%20WIB>

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>

